



## BAB II

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORITIK

#### A. Kepemimpinan Politik

##### 1. Pengertian Kepemimpinan

Istilah kepemimpinan tidak dapat terlepas dari kata "memimpin" yang memiliki beberapa arti yaitu: memegang tangan seseorang sambil berjalan (untuk menuntun atau menunjukkan jalan), mengetahui atau mengepalai (dalam rapat atau perkumpulan), memandu, melatih (mendidik, mengajari). Juga ada kata "terpimpin" yang berarti dapat dipimpin atau terkendali, serta ada pula kata "pemimpin" yang memiliki dua arti: orang yang memimpin dan petunjuk, buku petunjuk (pedoman).<sup>1</sup>

Secara etimologi pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok. Kemudian secara terminologis banyak ditemukan definisi tentang pemimpin. Para pakar manajemen biasanya mendefinisikan pemimpin menurut pandangan pribadi mereka, dan aspek-aspek fenomena dari kepentingan yang paling baik bagi pakar yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Menurut Burns bahwa kepemimpinan merupakan proses hubungan timbal balik pemimpin dan pengikut dalam memobilisasi berbagai sumber

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet 10 (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 769.

<sup>2</sup> Winardi, *Kepemimpinan dalam Manajemen*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990), 12.



daya ekonomi politik dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, Gardner berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan suatu atau sekumpulan aktivitas yang teramati oleh pihak lain, berlangsung dalam kelompok, organisasi atau lembaga, dan melibatkan pemimpin dan pengikut yang bekerjasama untuk mewujudkan tujuan umum yang direncanakan. Sedangkan Hary S. Truman mengartikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk memperoleh orang-orang agar mengabaikan apa yang tidak disukai dan melaksanakan apa yang disukai.<sup>3</sup>

Pengertian Kepemimpinan diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan berbagai tugas yang berhubungan dengan aktivitas anggota kelompok. Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi berbagai strategi dan tujuan bersama dan kemampuan mempengaruhi kelompok agar mengidentifikasi, memelihara dan mengembangkan budaya organisasi.<sup>4</sup>

Menurut Sedarmayanti, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga perilaku orang lain berubah/tetap menjadi integratif.<sup>5</sup> Alfian mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses dimana seseorang punya pengaruh dalam satu kelompok (organisasi) untuk menggerakkan individu lain

---

<sup>3</sup> Miftah Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen, Suatu Pendekatan Perilaku*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995), 63.

<sup>4</sup> Winardi, *Kepemimpinan dalam Manajemen...*, 47

<sup>5</sup> Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Public, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009), 121.

meraih tujuan bersama.<sup>6</sup> Alfian meringkas beberapa definisi ahli kepemimpinan dalam 5 perspektif, diantaranya:

**Tabel 2.1** Perspektif Kepemimpinan

<b>Perspektif</b>	<b>Pengertian Kepemimpinan</b>
<i>Focus of group processes</i>	Pemimpin merupakan pusat segala aktivitas dan perubahan kelompok. Kepemimpinan adalah pusat kehendan yang menggerakkan aneka aktivitas, perubahan, dan perkembangan kelompok (organisasi).
<i>Personality Perspective</i>	Pemimpin merupakan perpaduan antara bakat khusus ( <i>special traits</i> ) dan karakteristik individu, yang memiliki kemampuan untuk mendelegasikan tugas pada orang lain secara sempurna.
<i>Act or Behaviour</i>	Kepemimpinan merupakan seperangkat tindakan dan perilaku tertentu yang mampu menggerakkan perubahan dalam organisasi
<i>Power relationship</i>	Kepemimpinan adalah relasi antara pemimpin

<sup>6</sup> M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), 65.

	( <i>leader</i> ) dan yang dipimpin ( <i>follower</i> )
<i>Instrument of goal achievement</i>	Kepemimpinan adalah upaya membimbing anggota mencapai tujuan bersama
<i>Skills Perspective</i>	Kepemimpinan adalah kapabilitas yang membuatnya bekerja secara efektif.

Sumber: M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).

Dari pengertian para ilmuwan ini dapat ditarik pemahaman bahwa kepemimpinan adalah berhubungan dengan proses mempengaruhi dari seseorang pemimpin kepada pengikutnya atau anggotanya guna mencapai tujuan organisasi dimana terdapat seni mengatur, mengelola dan mengarahkan orang dengan kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, kerjasama, semangat, dan potensi-potensi yang ada guna mencapai tujuan yang di cita-citakan.

## 2. Pengertian Kepemimpinan Politik

Dalam melakukan kajian terkait dengan kepemimpinan, perlu adanya pembedaan yang signifikan antara kepemimpinan yang bersifat struktural atau administratif, dengan kepemimpinan yang lebih mengarah pada kepemimpinan politik. Oleh Karena itu perlu ditegaskan kembali dalam penelitian ini bahwa selain harus memahami pengertian tentang kepemimpinan, harus dipahami pula pengertian tentang kepemimpinan politik.



Pada dasarnya kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak sebaliknya, mirip dengan kekuasaan, kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Berbeda dengan kekuasaan yang terdiri atas banyak jenis sumber pengaruh, kepemimpinan lebih menekankan pada kemampuan menggunakan persuasi untuk mempengaruhi pengikut. Selain itu, tidak seperti kekuasaan yang belum tentu menggunakan pengaruh untuk kepentingan bersama pemimpin maupun para pengikutnya.

Oleh karena itu, kepemimpinan politik juga berbeda dengan elit politik, karena seperti yang dikemukakan oleh Pareto<sup>7</sup>, elit ialah orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang paling dinilai tinggi dalam masyarakat, seperti prestise, keyakinan, ataupun kewenangan, memiliki kekuasaan politik berbeda dengan memiliki kepemimpinan politik, karena dua hal, yaitu jenis sumber pengaruh yang digunakan dan tujuan penggunaan pengaruh.

Sebutan politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga-lembaga pemerintahan), dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan). Oleh karena itu, pemimpin politik juga berbeda dengan kepala suatu instansi pemerintahan karena yang terakhir ini lebih menggunakan kewenangan dalam mempengaruhi bawahannya. Tidak seperti kepala suatu instansi yang cenderung menggunakan hubungan-

---

<sup>7</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1990), 134.



hubungan formal dan impersonal dalam menggerakkan bawahannya, pemimpin politik lebih menggunakan hubungan-hubungan informal dan personal dalam menggerakkan pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>8</sup>

Akan tetapi, orang yang secara formal menjadi elit politik atau kepala suatu instansi dapat saja memainkan peranan sebagai pemimpin politik kalau memenuhi karakteristik kepemimpinan tersebut. Penyelenggara politik dan pemerintahan yang sukses biasanya orang yang dapat menggunakan berbagai tipe penggunaan sumber pengaruh sesuai dengan konteks dan jenis permasalahan.

Selain itu, kepemimpinan politik juga dapat dipahami dalam tiga perspektif: 1) kepemimpinan sebagai pola perilaku. 2) kepemimpinan sebagai kualitas personal. 3) kepemimpinan sebagai nilai politik. Sebagai pola perilaku, kepemimpinan terkait sekali dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengupayakan tujuan yang diharapkan.

Kepemimpinan politik dituntut untuk mampu mempertahankan konstituen politik dengan baik, bahkan mampu memunculkan dukungan-dukungan politik yang signifikan, mampu mengelola potensi konflik yang ada dengan baik dan efektif, mampu memotivasi anak buah dan konstituennya dengan baik, sehingga senantiasa optimis dan mampu bangkit dari keterpurukan. Di samping itu, ia juga dituntut untuk mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan segmen manapun, mampu memberi contoh dan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 134.



mendorong suatu proses pendidikan dan pencerahan politik, mampu menghadirkan proses sirkulasi elite di dalam organisasi secara sehat, dan mampu mendudukan orang-orangnya di posisi-posisi strategis di lembaga-lembaga politik kenegaraan yang ada. kepemimpinan politik juga harus selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang substansial. Seorang pemimpin politik harus paham benar etika politik, sehingga proses dan dinamika politik berjalan secara beradab.<sup>9</sup>

## **B. Kepemimpinan Syiah**

Dalam pandangan Syiah, umat Islam haruslah mempunyai pemimpin, yang populer dengan sebutan “*imam*”. Imam tersebut adalah berfungsi sebagai pemegang pimpinan dan kekuasaan dalam memelihara dan penerus agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Kepemimpinan umat sebelum Nabi wafat dipegang oleh Nabi sendiri. Setelah ia wafat kekuasaan tersebut harus dipegang oleh imam dari keturunan *ahl al-bait*.<sup>10</sup>

Seorang ulama Syiah terkenal, Ali Syariati mengatakan, Nabi diangkat oleh Allah. Oleh karena itu, meskipun semua orang tidak menerima kenabiannya dan meskipun orang-orang tidak memberikan suara baginya, dia tetap juga sebagai Nabi, sedikitpun tidak akan memperkuat kedudukannya. Fakta persoalan ini ialah bahwa kedudukan Nabi bukanlah merupakan kedudukan sesuatu yang lazim dengan dipilih. Kenabian bukan suatu dinasti (kekuasaan) yang diberikan oleh rakyat kepada seseorang. Jadi, seorang Nabi

---

<sup>9</sup> M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik...*, 12

<sup>10</sup> Fadli Su'ud Ja'fari, *Islam Syiah, Telaah Pemikiran Imamah Habib Husein Al-Habsyi*, (Malang, UIN MALIKI PRESS, 2010). 105

bukanlah seseorang yang dipilih. Karena alasan ini menurut argumen mereka (Syiah) misi Nabi mesti berada di tangan seorang penggantinya yang memenuhi syarat bagi kepemimpinan dan misi-misi yang serupa dengan kepemimpinan dan misi Nabi itu sendiri.<sup>11</sup>

Bagi umat Syiah, Ali bin Abi Thalib dan sebelas keturunannya (*Ahl al-bait*), adalah yang paling berhak menggantikan kedudukan Nabi. Hal ini, menurut seorang ulama Syiah, A. Syarafuddin al-Musawi,<sup>12</sup> antara lain didasarkan pada:

1. “Kesucian ahl al-Bait” sebagaimana ditegaskan Allah dalam Surat al-Ahzab, 33:33, yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ

وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

تَطَهِّرًا

Artinya: *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.* (QS: Al-Ahzab:33).

<sup>11</sup> Ali Syari'ati, *Wasiat atau Musyawarah*, Terj. M. Hashem (Jakarta, Yayasan Bina Tauhid, 2010). 9

<sup>12</sup> A. Syarafuddin al-Musawi, *Dialog Sunni Syiah*, (Bandung: Mizan, 1994). 36



2. Hadits Nabi yang disampaikan ketika pulang dari haji *wada'* dan beristirahat di tempat yang bernama *Ghadir Khum*.

Hadis tersebut berbunyi:

“Kurasa seakan-akan aku segera akan dipanggil (Allah), dan segera memenuhi panggilan itu, maka sesungguhnya aku meninggalkan padamu *ats-Tsaqalani* sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki seseorang. Yang satu lebih agung daripada yang kedua, yaitu kitab Allah dan ‘itrahku (kerabatku-*ahl al-bait*). Jagalah baik-baik kedua peninggalanku itu, sebab keduanya takkan berpisah sehingga berkumpul kembali denganku di *al-Haud*. Kemudian beliau berkata lagi: “Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla adalah *Maulaku* (pemimpinku), dan aku adalah *maula* (pemimpin) setiap mukmin. Lalu beliau mengangkat tangan Ali ibn Abi Thalib sambil bersabda: “Barang siapa yang menganggap aku sebagai pemimpinnya, maka dia Ali adalah juga pemimpin baginya. Ya Allah, cintailah siapa yang mencintainya, dan musuhilah siapa yang memusuhinya.”

Pesan yang ingin disampaikan oleh kelompok ini dengan bersandar pada dalil-dalil *naqli* (ayat dan hadits terlepas dari valid serta tepatnya dan tidaknya penggunaan dasar tersebut) tidak lain adalah untuk membuktikan, bahwa keberadaan para Imam Syiah tersebut benar-benar “ditunjuk” oleh Allah. Oleh karenanya, tidak diragukan lagi integritas dan kredibilitasnya dalam mengemban misi *religious* dan politis secara bersamaan. Dengan demikian, keberadaan lembaga imamah tersebut diyakini mampu berfungsi untuk menopang dan memaklumkan pemerintah yang adil.<sup>13</sup>

### C. Kepemimpinan Sunni (Ahlu Sunnah wal Jama'ah)

Ahlu Sunnah atau dikenal dengan Sunni pada mulanya merupakan sekelompok ulama yang berpendirian bahwa orang-orang dalam Syiah,

---

<sup>13</sup> Fadli SJ-Abdul Halim, *Politik Islam Syiah*...,5.



Khawarij, Murji'ah dan Mu'tazilah telah banyak menyeleweng dari ajaran agama, atau lebih tegas lagi telah menyeleweng dari "sunnah nabi" dan "sunnah para salaf". Sunni merupakan sebuah kelompok besar dalam Islam yang tetap teguh untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi, yang itu berbeda dengan aliran-aliran lain dalam Islam.

Sunni sebagai salah satu dari aliran dalam Islam, mendasarkan teori politiknya dan praktek-praktek yang dilakukan oleh *khulafa' ar-rasyidin* dalam berbagai aspek politiknya, mulai dari bentuk Negara, prosedur pengangkatan imam, kualifikasi seorang pemimpin dan undang-undang yang harus diterapkan dalam suatu Negara.<sup>14</sup>

Berpijak dari sikap perilaku (*uswah al-hasanah*), khulafa' ar-rosyidin dalam pemimpin Negara, maka paradigma pemikiran politik Sunni secara umum didasarkan atas empat prinsip. *Pertama*, berdasarkan kualitas dan kemampuan seorang imam. *Kedua*, bai'at yaitu perjanjian yang disepakati oleh mayoritas umat Islam dalam pemilihan kepala Negara yang dilakukan oleh *ahl alhalli wal' aqdi*. *Ketiga*, prinsip musyawarah (*Syura*) yaitu sebuah prinsip konsultasi bersama untuk membahas pemilihan imam (*kholifah*). *Keempat*, prinsip keadilan. Keadilan menurut Islam adalah nilai-nilai fundamental (*fundamental values*) dan nilai universal (*universal values*) yang berlaku dalam undang-undang ataupun dalam tehnik operasional.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunnah Wal-Jama'ah: Dalam Persepsi dan Tradisi NU*, (Jakarta, Lantabora Press), 63.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 67

Menurut argumen masyarakat Sunni mengenai kepemimpinan, mereka menyebutkan, bahwa Nabi pada saat-saat akhir hayatnya, bermaksud menulis surat wasiat tentang penjelasan masalah suksesi, namun karena adanya protes-protes, Nabi mengurungkan maksudnya. Oleh karena itu, apabila Nabi mengemban misi perintah resmi dari Tuhan, maka tidaklah mungkin Nabi akan mengurungkannya, hanya ada orang yang protes, sehingga Nabi tidak memaklumkan bahwa Ali r.a. sebagai penerus risalah Nabi.

Dalam kitab-kitab Sunni juga dikatakan, bahwa walaupun pada mulanya Ali memprotes pemilihan khalifah di *Tsaqifah Bani Sa'adah* yang menghasilkan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam Islam, namun pada akhirnya Ali juga mengakui dan menerima secara resmi.

Oleh karena itu apabila kedudukan Ali ibn Abi Thalib, sebagaimana kenabian (yang dipercaya Syiah), datang dari Allah, maka dalam bentuk dan ketentuan apapun Ali tidak dapat menerima dan membaiah siapapun selain dirinya sebagai pemimpin. Dengan demikian ia tidak dapat membenarkan yang lain menggantikan kedudukannya.<sup>16</sup>

#### **D. Teori-teori Kepemimpinan**

Sejarah lahirnya pemimpin tidak lepas dari fungsi akan kepemimpinan. Ia muncul bersama peradapan manusia sejak zaman Nabi-nabi dan nenek moyang yang terjadi kerjasama antar manusia dalam menjamin kelangsungan hidupnya. Kepemimpinan diperlukan dalam menjaga kepatuan

---

<sup>16</sup> Ali Syariati, *Wasiat atau Musyawarah...*,10.

dan kesatuan para anggotanya dalam mengatur maupun menghadapi pengaruh luar maupun di dalam suatu kelompok tertentu. Dengan ringkasnya, pemimpin dan kepemimpinan dimanapun dan kapanpun selalu diperlukan baik sekarang maupun masa yang akan datang.

Adapun dari berbagai teori yang membahas tentang kepemimpinan, ada 3 teori tentang asal mula atau lahirnya pemimpin diantaranya<sup>17</sup>:

1. Teori genetic (*genetic theory*), yakni pemimpin lahir karena mewarisi bakat yang diturunkan orang tua atau leluhur.
2. Teorisocial (*traits theory*), yakni pemimpin bukan diwariskan tetapi diciptakan dan dibentuk.
3. Teori ekologi (*behavioral theory*), yakni pemimpin diciptakan oleh lingkungannya.<sup>18</sup>

Menurut French dan Raven<sup>19</sup>, kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin dapat bersumber dari :

- 1) *Reward Power*, yang didasarkan atas persepsi bawahan, bahwa pemimpin mempunyai kemampuan dan sumberdaya untuk memberikan penghargaan kepada bawahan yang mengikuti arahan-arahan pemimpinnya.
- 2) *Coercive power*, yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai kemampuan memberikan hukuman bagi bawahan yang tidak mengikuti arahan-arahan pemimpinnya.

---

<sup>17</sup> Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Public...*, 126.

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *pemimpin dan kepemimpinan...*, 29

<sup>19</sup> French dan Raven, "Pemimpin Transformasional, Pemimpin Transaksional, dan Dorongan Inovasi" (Jurnal Psikologi, 1996), 102.



- 3) *Legitimate power*, yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin mempunyai hak untuk menggunakan pengaruh dan otoritas yang dimilikinya.
- 4) *Referent power*, yang didasarkan atas identifikasi (pengenalan) bawahan terhadap sosok pemimpin. Para pemimpin dapat menggunakan pengaruhnya karena karakteristik pribadinya, reputasinya atau karismanya.
- 5) *Expert power*, yang didasarkan atas persepsi bawahan bahwa pemimpin adalah seorang yang memiliki kompetensi dan mempunyai keahlian dalam bidangnya. Para pemimpin dapat menggunakan bentuk-bentuk kekuasaan atau kekuatan yang berbeda untuk mempengaruhi perilaku bawahan dalam berbagai situasi.

Dalam teori kepemimpinan di kenal 5 teori kepemimpinan, diantaranya<sup>20</sup>:

1. Teori kepemimpinan karakteristik bawaan (*trait theories of leadership*), yakni pendekatan yang mengasumsikan pemimpin memiliki ciri fundamental yang berada dengan pengikut. Titik poin teori ini menekankan pada karakteristik seorang pemimpin yang mengidentifikasikan bahwa seorang pemimpin memiliki kemampuan yang memungkinkan mendapatkan tanggungjawab kepemimpinan karena memiliki kemampuan yang lebih dari yang lain.
2. Teori kepemimpinan situasional (*Contingency Theory of leadership*), yakni pendekatan yang mengasumsikan bahwa kepemimpinan pada situasi

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 126.



tertentu tidaklah paten, namun diperlukan kepemimpinan yang berbeda dari situasi yang berbeda karena setiap masa diperlukan gaya kepemimpinan yang berbeda sehingga menghasilkan efek berbeda dari situasi yang juga berbeda.

3. Teori kepemimpinan transaksional (*transactional Theory of Leadership*) yakni teori yang memandang bahwa kepemimpinan dipandang lebih dalam kaitannya dengan perilaku pemimpin dan bagaimana perilaku mempengaruhi dan dipengaruhi kelompok pengikut. Dalam hal ini, antara pemimpin dan yang dipimpin terjadi transaksi atau pertukaran kepentingan yang saling menguntungkan.<sup>21</sup>
4. Teori kepemimpinan karismatik, yakni teori yang dimiliki pemimpin yang bukan karena tradisi ataupun kewenangan tetapi karena memperoleh kekuatan supernatural Tuhan. Kepemimpinan kharismatik bukan sekedar keyakinan terhadap kepercayaan, tetapi memiliki kemampuan daya tarik tertentu yang membuat bawahan menjadi percaya dan hormat serta menjadi sebuah idola dan pujaan sebagai figur spiritual.
5. Teori kepemimpinan transformasional, yakni teori kepemimpinan yang menitik beratkan pada pemimpin yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan terhadap segala hal (reformis) yang melekat dan tertanam dalam organisasi melalui penyempurnaan dan penciptaan visi dan misi yang jelas dan tegas serta kemampuan untuk mewujudkan pencapaian

---

<sup>21</sup> *Ibid.*



visi tersebut. Kepemimpinan transformasional merupakan gambaran pemimpin yang memiliki pandangan jauh ke depan.

#### **E. Teori Konflik**

Teori Konflik adalah kebalikan dari teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme structural menggambarkan masyarakat sebagai kesatuan yang berintegrasi atas dasar nilai-nilai yang dibagi bersama yang telah disepakati, dibatinkan, dan didukung dengan spontan. Teori konflik mengambil posisi sebaliknya. Karl Marx menyatakan bahwa seluruh sejarah sosial manusia adalah sejarah pertentangan antara kelas penguasa (kapitalis) dan kelas yang dikuasai (proletar). Bahwa, keadaan sosial yang tampak di permukaan sebagai tertib dan teratur sebetulnya dihasilkan dari proses penindasan yang berlangsung di bawah permukaan. Keseimbangan sistem sosial yang pada mulanya dikira sebagai akibat dari adanya consensus atau nilai-nilai bersama (*common values*) adalah manipulasi pihak yang berkuasa.<sup>22</sup>

Salah satu tokoh teori konflik adalah Ralf Dahrendorf. Menurutnya, masyarakat secara esensial adalah anak sejarah. Sejarah masyarakat adalah sejarah perubahan. Tidak ada satu pun masyarakat yang tidak berubah. Perubahan yang terus menerus ini menyingkap satu fakta yang selama ini tidak bisa dilihat oleh teori fungsionalisme struktural, yaitu bahwa setiap masyarakat didorong oleh kekuatan konflik yang membuatnya bisa berkembang dan berubah. Bahkan secara tegas dinyatakan bahwa dimana ada

---

<sup>22</sup> K.J. Veeger, *Realitas Sosial* (Jakarta: Gramedia, 1993), 211.



kehidupan, disitu ada konflik.<sup>23</sup> Setiap unsur dalam masyarakat menyumbang kepada disintegrasi dan perubahan. Jika sosial tanpa seimbang dan tersusun dalam orde yang harmoni, maka itu sesungguhnya dihasilkan dari tindakan segelintir orang yang berkuasa yang memaksakan nilai-nilainya kepada kelompok selebihnya.<sup>24</sup> Dalam skema pembagian masyarakat ke dalam dua kelas, penguasa (superordinat) dan yang dikuasai (subordinat), maka konflik itu sudah tertanam dalam jantung masyarakat itu sendiri karena setiap kelas memiliki kepentingannya sendiri yang saling berlawanan. Kelompok yang berkuasa memiliki kewenangan (*authority*) atas orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dengan kekuasaan dan kewenangan ini, pihak penguasa mengontrol tingkah laku kelompok subordinat melalui kewajiban dan larangan. Pihak penguasa memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo yang telah member keistimewaan baginya, sedangkan kelompok yang dikuasai memiliki kepentingan untuk melakukan perubahan dan perombakan. Setiap tindakan pelanggaran atas kepentingan kelas ini akan direspon dengan hukuman untuk mempertankan struktur yang ada. Jika sistem sosial tetap seimbang, maka itu sesungguhnya adalah hukuman dan tekanan, bukan konsensus. Perlu ditekankan disini bahwa kepentingan adalah kepentingan kelas objektif, bukan kepentingan subjektif individu-individu.<sup>25</sup>

Dari sini jelas bahwa integrasi dan pengakuan terhadap kepemimpinan seseorang atau kelompok orang bukan didasarkan dari kesepakatan yang

---

<sup>23</sup> Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (Stanford, California: Stanford University Press, 1959), 208

<sup>24</sup> *Ibid.*, 162

<sup>25</sup> *Ibid.*





*fixed*. Pihak yang berkuasa mengideologikan nilai-nilainya. Dengan berlakunya nilai-nilainya, maka kepemimpinannya menjadi kokoh. Oposisi berarti delegitimasi nilai-nilai yang disaktikan tersebut, yang itu berarti mensubversi kepemimpinan individu atau kelompok yang ada. Setiap kekuatan oposisi akan dilenyapkan agar status quo tidak terganggu.

Di sisi lain, Lewis Coser mendefinisikan konflik sebagai “*a struggle over values and claims to secure status, power, and resources, a struggle in which the main aims of opponents are to neutralize, injure, or eliminate rivals*”.<sup>26</sup> Definisi ini menjelaskan bahwa konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber daya yang persediannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka.

Definisi Coser memperjelas basis konflik sosial pada sesuatu yang lebih riil. Dahrendorf sendiri menyatakan bahwa konflik terjadi karena berebut mendapatkan kontrol atas sumberdaya dan posisi yang terbatas.<sup>27</sup> Konflik terjadi apabila kelompok yang berbeda berebut untuk menguasai sesuatu. “Sesuatu” disini bisa berupa sumber material. “Sesuatu” disini juga bisa berupa sumber legitimasi kepemimpinan atau kewenangan (*authority*) dalam sebuah kelompok, sebagaimana yang dijabarkan oleh Dahrendorf di atas. Legitimasi kepemimpinan ini terkait dengan nilai-nilai. Jika nilai-nilai

---

<sup>26</sup> Lewis A. Coser, *The Function of Social Conflict* (Glencoe: Free Press, 1956), 76.

<sup>27</sup> Dahrendorf, *Class and Class Conflict*...,209

suatu kelompok menjadi ideology atau nilai yang dijadikan sumber rujukan oleh komunitas, maka kelompok tersebut (atau tokohnya) dengan sendirinya akan menjadi pemimpin moral komunitas tersebut. Kepemimpinan kelompok tersebut atas komunitas akan semakin kokoh.<sup>28</sup> Alasan konflik tersebut bisa hasir sebagian atau semuanya. Studi Peter M. Blau menyatakan bahwa skala konflik tergantung pada banyak tidaknya faktor yang bertentangan di antara kelompok-kelompok konflik. Konflik akan terjadi sangat intens dan akut apabila semua unsur yang membedakan antarkelompok tersebut hadir pada saat yang bersamaan.<sup>29</sup>

Teori ini diambil untuk menjelaskan konflik Syiah dan Sunni di Sampang yang dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh agama dan Ulama di Sampang (Madura) yang mayoritas Sunni untuk meredam berkembangnya kelompok Syiah di Madura. Tentunya persaingan ini akan mengganggu otoritas yang dimiliki oleh tokoh-tokoh agama dan Ulama (kyai) tersebut. Kepentingan tersembunyi yang ada pada sebagian besar para ulama-ulama di Madura tidak ingin otoritasnya berkurang dengan adanya kelompok Syiah yang mulai berkembang di Sampang. Madura merupakan daerah yang identik dengan Islam yang fanatik dan peran kyai (ulama) yang dominan dan penting sebagai pimpinan agama, pemimpin masyarakat dan berkembang ke pemimpin politik, sehingga otoritas (kekuasaan) merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap ulama untuk mempertahankan eksistensinya di

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 167

<sup>29</sup> Peter M. Blau, *Inequality and Heterogony: a Primitive Theory of Social Structure* (New York: The Free Press, 1977), 98.



dalam sistem kultur masyarakat yang fanatik terhadap agama dan ulamanya  
(kyai).